

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI  
DAERAH (PAD)  
DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH (APBD)  
KABUPATEN/KOTA EKS KARESIDENAN KEDU  
PERIODE TAHUN 2001-2011**

**Oleh :**

**Muhammad Asa'at Purba,**

**Rusmiyati**

**Whinarko Julipriyanto**

*Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Magelang*

***ABSTRACT***

*The Implementation of the Indonesian government policy on regional autonomy that was effectively commenced since 1 January 2001, is considered as a very democratic policy and fulfilling aspects of real decentralization. Decentralization itself aims to improve the welfare and public services, development of democracy life, justice, equity, and the maintenance of harmonious relations between the central and regional as well as between regional and regional.*

*Regional Revenue (PAD) are all local revenues derived from the native of economic resources. General Allocation Fund (DAU) is fund that sourced from the state budget allocated to bring equity*

finance capabilities among regions to fund the needs of the region in the implementation of decentralization. This research aimed to 1) determine the amount of PAD and DAU in each District / City Eks Karisedanan Kedu, 2) to find out whether PAD will impact towards the Regional Expenditure Budget (APBD) of District/City Eks Karisedanan Kedu, 3) to find out whether the DAU will impact the Regional Expenditure Budget of District/City Eks Karisedanan Kedu.

The observed variables in this research are PAD, DAU and APBD Year 2001-2011. The data that have been obtained is secondary data, then the data is analyzed by using multiple linear regression analysis methods and F examination. The results of the research are:

From those six Regional Level II Eks Karisedanan Kedu, there are four areas namely Magelang City, Purworejo District, Temanggung District and Wonosobo District have Regional Expenditure Budget that is highly supported by its each PAD. It can be seen from the amount of the regression coefficients and the role of PAD in sequentially as follows; b1 the amount for Wonosobo District is 7,114; b1 for Magelang City is 6.697; b1 for Temanggung District is 4,621; b1 for Purworejo District is 4.532. Infact, the role of PAD towards Regional Expenditure Budget for Magelang District and Kebumen District is negative;

The dominant role of the DAU towards Regional Expenditure Budget is located in Magelang District, Kebumen District, then followed by Purworejo District, Temanggung District and Wonosobo District. It can be seen from the amount of the coefficients as follows; b2 the amount for Magelang District and Kebumen District is 1,562; b2 for Purworejo District is 1,012 ; b2 for Temanggung District is 0.944; b2 for Wonosobo District is 0.904;

Based on the R Square for each Local Government District / City Eks Karisedanan Kedu as follows; Magelang City = 0.824; Magelang District = 0.966; Purworejo District = 0.974; Kebumen District = 0.966; Temanggung District = 0.990 and Wonosobo

*District = 0.985.*

*Based on the figures above, it can be concluded that the average for each District Local Government / City Ex Residency Kedu, has Regional Expenditure Budget that is financed by more than 96 % of PAD and DAU, while the remaining is less than 3.5 % came from other income . Unless Regional Expenditure Budget of Magelang City which is 82.4%, is financed by PAD and DAU, while the remaining is 17.6 % came from other income.*

**Keywords : budget , revenue and DAU**

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di Undang - Undang Otonomi Daerah No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah menggantikan UU No. 22 tahun 1999. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya.

Mengacu pada UU No.32/2004 yang menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah (PEMDA), Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari

pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, PEMDA mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemda. Seharusnya dana transfer dari Pemerintah pusat dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemda untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Apabila fungsinya sudah terlaksana secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan Pendapatan Asli Daerah. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah.

Permasalahan Dana Alokasi Umum (DAU) terletak pada perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah tentang Dana Alokasi Umum. Bagi pusat, Dana Alokasi Umum dijadikan instrument *horizontal imbalance* untuk pemerataan atau mengisi *fiscal gap*. Bagi daerah, Dana Alokasi Umum dimaksudkan untuk

mendukung kecukupan. Permasalahan timbul ketika daerah meminta Dana Alokasi Umum sesuai kebutuhannya. Di sisi lain, alokasi Dana Alokasi Umum berdasarkan kebutuhan daerah belum bisa dilakukan karena dasar perhitungan *fiscal needs* tidak memadai (terbatasnya data, belum ada standar pelayanan minimum masing-masing daerah, dan sistem penganggaran yang belum berdasarkan pada standar analisis belanja. Ditambah total pengeluaran anggaran khususnya APBD belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan cenderung tidak efisien. Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh, lebih banyak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diajukan sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten / Kota Eks Karesidenan Kedu Periode 2001 – 2011.
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten / Kota Eks Karesidenan Kedu Periode 2001 – 2011.
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten / Kota Eks Karesidenan Kedu Periode 2001 – 2011.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Otonomi Daerah**

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 32 Tahun, 2004). Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Bidang-bidang tersebut tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman. Peluang otonomi daerah sangat terbuka lebar seiring dengan proses demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **2. Desentralisasi Fiskal**

Terminologi desentralisasi ternyata tidak hanya memiliki satu makna. Ia dapat diterjemahkan ke dalam sejumlah arti, tergantung pada konteks penggunaannya. Parson dalam (Hidayat, 2005) mendefinisikan desentralisasi sebagai berbagi (*sharing*) kekuasaan pemerintah antara kelompok pemegang kekuasaan di pusat dengan kelompok-kelompok lainnya, di mana masing-masing kelompok tersebut memiliki otoritas untuk mengatur bidang-bidang tertentu dalam lingkup teritorial suatu Negara. Desentralisasi sesungguhnya merupakan alat atau instrument yang dapat digunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan partisipatif). Sebagai suatu alat, desentralisasi dapat digunakan pemerintah untuk mendekatkan diri dengan rakyatnya, baik untuk memenuhi tujuan demokratisasi atau demi mewujudkan kesejahteraan

masyarakat. Secara garis besar, kebijakan desentralisasi dibedakan atas 3 jenis:

1. Desentralisasi politik yaitu pelimpahkan kewenangan yang lebih besar kepada daerah yang menyangkut berbagai aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar dan berbagai peraturan.
2. Desentralisasi administrasi yaitu merupakan pelimpahan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya antar berbagai tingkat pemerintahan.
3. Desentralisasi fiskal yaitu merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi. Ketiga jenis desentralisasi ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya dan merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan dilaksanakannya desentralisasi, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Desentralisasi fiskal tidak akan berguna jika tidak diikuti dengan kemampuan finansial yang cukup memadai oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu melalui UU No. 33/2004, diharapkan nantinya akan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah menurut UU No. 33/2004 dalam pelaksanaan desentralisasi meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Dalam UU. No 33/2004 memberikan kewenangan bagi daerah untuk meningkatkan kemampuan pendapatannya, yaitu dengan meluaskan jangkauan dari bagian

pajak dan bagi hasil sumber daya alam dengan pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus dapat meningkatkan penerimanya untuk mem-biayai kegiatan pembangunan, namun di era desentralisasi fiskal harapan itu belum optimal yang tercermin dalam pertumbuhan.

### **3. Konsep Tentang Dana Alokasi Umum**

Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah. Perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembayaran penyelenggaraan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban, dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan (Widjaya, 2004).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dimulai sejak 1 Januari 2001, maka pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Dalam menjalankan tugasnya sebagai daerah otonom, pemerintah daerah sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat yang berupa bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU merupakan penyangga utama pembiayaan APBD



yang sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang.

#### **4. Konsep Tentang Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). PAD merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari PAD dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Elita Dewi dalam jurnalnya yang membahas tentang Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, dijelaskan bahwa identifikasi adalah pengenalan atau pembuktian sama, jadi identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan, dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal. Sedangkan PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Sumber PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah yang bersangkutan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **5. Konsep Tentang Belanja Daerah**

Dalam [www.jakarta.go.id](http://www.jakarta.go.id), menyebutkan bahwa belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Instrumen utama untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah adalah anggaran daerah, yang merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) selama satu periode tertentu (satu tahun). Perencanaan pengeluaran tersebut mengandung enam prinsip dasar dalam pengalokasian anggaran kepada unit kerja dan antar jenis pengeluaran.

## **C. METODE PENELITIAN DAN ANALISIS**

### **1. Bentuk penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian diskriptif analisis yaitu penelitian yang hanya melukiskan keadaan suatu obyek atau persoalan dan tidak dimaksudkan untuk mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku secara umum. Sedangkan analisis adalah suatu kegiatan pembuatan analisa-analisa sebagai dasar bagi penarikan kesimpulan (Marzuki, 2000).

### **2. Jenis data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data skunder,

yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, yang dalam hal ini adalah data yang telah diolah oleh pihak lain atau tidak dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari responden. Dalam penelitian ini data skunder yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu Tahun 2002 – 2011.

### **3. Analisis data**

Analisis data adalah sebuah metode yang akan menjadi dasar bagi penarikan kesimpulan terhadap data yang sudah terkumpul. Dalam penelitian ini digunakan alat analisis regresi linier berganda.

#### **1. Analisis regresi linier berganda**

Analisis ini digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya variabel dependen (kriterium) bila dua atau lebih variabel independent sebagai faktor prediktor dimanipulasi (Ghozali, 2009). Perhitungan dibantu dengan Program SPSS release 19 for windows. Hasil perhitungan akan diterapkan pada rumus sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

Keterangan :

- Y = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- a = konstanta (pendapatan diluar DAU dan DAK)
- X<sub>1</sub> = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b<sub>1</sub> = koefisien regresi X1
- X<sub>2</sub> = Dana Alokasi Umum (DAU)
- b<sub>2</sub> = koefisien regresi X2

### Uji F

Uji F digunakan untuk menguji koefisien regresi secara simultan (bersama-sama sekaligus) dengan mempergunakan criteria uji F ( F test criteria) yang sering disebut pengujian signifikansi secara keseluruhan untuk memperkirakan garis, yaitu apakah variable independen berkorelasi atau berhubungan secara linier terhadap variable dependen secara bersama-sama. Ketentuan uji F adalah sebagai berikut (Ghozali, 2009) :

**Ho :**  $b_1, b_2 = 0$  : bahwa secara bersama-sama tidak ada pengaruh variabel independen  $X_1$  (PAD) dan  $X_2$  (DAU) terhadap variabel dependen Y (APBD).

**Ho :**  $b_1, b_2 \neq 0$  : bahwa secara bersama-sama ada pengaruh variabel independen  $X_1$  (PAD) dan  $X_2$ (DAU) terhadap variabel dependen Y (APBD).

Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan  $k - 1$  dan  $n - k$ , dengan model perhitungan untuk mencari nilai ketetapan pada tabel F sebagai berikut :

$$F = a \text{ (df}_1 = n - 1, \text{df}_2 = k - 1) = 0,05$$

Kemudian nilai F dihitung dapat diperoleh dengan rumus :

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

**Keterangan :**

$R^2$  = koefisien determinasi

$n$  = banyaknya observasi

$k$  = banyaknya variabel bebas

Nilai uji F digunakan untuk mengetahui kecenderungan variabel independen yang mempunyai hubungan terhadap variabel dependen. Hasil yang didapatkan dibandingkan dengan F tabel dengan keterangan sebagai berikut

Jika  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima, berarti  $X_1$  (PAD), dan  $X_2$  (DAU) mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap Y (APBD).

Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima,  $H_a$  ditolak, berarti  $X_1$  (PAD) dan  $X_2$  (DAU) tidak mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap Y (APBD).

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Kota Magelang**

Besarnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Kota Magelang tahun 2001 – 2011 dapat dilihat dari perhitungan berikut;

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.053E8	3.239E7		3.250	.012
	PAD	6.697	1.843	1.249	3.633	.007
	X2	-.299	.259	-.397	-1.154	.282
Dependent Variable: APBD Mgl						

Dari hasil perhitungan dengan bantuan SPSS, dapat diperoleh persamaan regresi untuk Kota Magelang sebagai berikut :  $Y = 1.053 + 6,697 X_1 - 0,299 X_2$ , kemudian didukung dengan  $F_{hitung} = 18,682 \geq F_{tabel} 0,05 = 4,46$ . Ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama PAD dan DAU mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap APBD Kota Magelang. Dari persamaan regresi diatas dapat disebutkan;

$a = 1053$  artinya apabila tidak terdapat dukungan dari PAD dan DAU, maka besarnya APBD Kota Magelang sebesar Rp.1,053 milyar.

$b_1 = 6,697$  artinya apabila pada tahun 2014 yang akan datang PAD meningkat 1 milyar, maka APBD Kota Magelang akan meningkat menjadi Rp.6,697 milyar.

$b_2 = -0,299$  artinya apabila pada tahun 2014 yang akan datang DAU meningkat 1 milyar, maka APBD Kota Magelang akan menurun Rp. 0,299 milyar.

Besarnya  $R^2 = 0,824$  artinya 82,4% APBD dibayar dari PAD dan DAU dan selebihnya 17,6% dari pendapatan lain-lain diluar PAD dan DAU.

Di Kota Magelang pendapatan asli daerah (PAD) sangat dominan dalam menopang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

## 2. Kabupaten Magelang

Untuk mengetahui besarnya jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) Kabupaten Magelang tahun 2001 – 2011 dapat dilihat dari perhitungan berikut ;

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-7.399E7	5.215E7		-1.419	.194
PAD	-.129	1.058	-.011	-.122	.906
DAU	1.562	.147	.991	10.653	.000
a. Dependent Variable: APBD Kb					

Dari hasil perhitungan dengan bantuan SPSS diperoleh persamaan regresi untuk artinya tanpa adanya PAD Kabupaten Magelang sebagai berikut ;  $Y = -7,399 - 0,12 X_1 + 1,562 X_2$  dan didukung oleh  $F_{hitung} = 115,168 \geq F_{tabel} = 4,46$  artinya bahwa secara bersama-sama PAD dan DAU mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap APBD. Dari persamaan regresi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ;

$a = -7,399$  artinya tanpa adanya PAD dan DAU maka APBD Kabupaten Magelang pada tahun yang bersanhgkutan negative atau memanfaatkan cadangan dari tahun yang lalu.

$b_1 = -0,129$  artinya apabila PAD Kabupaten Magelang meningkat sebesar Rp. 1 milyar maka APBD akan menurun sebesar Rp.0,129 milyar.

$b_2 = 1,562$  artinya apabila DAU meningkat sebesar Rp. 1 milyar, maka APBD akan meningkat sebesar Rp. 1,562 milyar. Dengan demikian maka APBD Kabupaten Magelang sangat tergantung pada DAU.

Besarnya  $R^2 = 0,966$  artinya 96,6% APBD Kabupaten Magelang ditopang oleh PAD dan DAU, sedangkan 3,4% berasal

dari pendapatan lain-lain diluar PAD dan DAU.

Untuk Kabupaten Magelang dana alokasi umum (DAU) sangat berperan dalam membiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

### 3. Kabupaten Purworejo

Untuk mengetahui besarnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) Kabupaten Purworejo tahun 2001 – 2011 dapat dilihat dari perhitungan berikut ;

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6.555E7	4.492E7		-1.459	.183
	PAD	4.532	1.923	.381	2.357	.046
	DAU	1.012	.263	.621	3.844	.005
a. Dependent Variable:						
APBD						

Berdasarkan perhitungan dengan bantuan SPSS diperoleh persamaan regresi untuk Kabupaten Purworejo sebagai berikut ;  $Y = -6,555 + 4,532 X_1 + 1,012 X_2$ . Kemudian didukung oleh besarnya  $F_{hitung} = 150,564 \geq F_{tabel} 4,46$ , artinya bahwa secara bersama-sama PAD dan DAU memiliki pengaruh secara bermakna terhadap APBD. Dari persamaan regresi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ;

$a = -6,555$  artinya tanpa adanya PAD dan DAU, maka APBD Kabupaten Purworejo harus ditopang oleh surplus anggaran tahun



yang lalu atau berasal dari hasil pinjaman.

$b_1 = 4,532$  artinya apabila pada tahun 2014 yang akan datang PAD meningkat sebesar Rp. 1 milyar maka APBD Kabupaten Purworejo akan mjeningkat sebesar Rp.4,532 milyar dengan asumsi DAU konstan.

$b_2 = 1,012$  artinya apabila pada tahun 2014 yang akan datang DAU meningkat sebesar Rp.1 milyar maka APBD akan meningkat sebesar Rp.1,012 milyar dengan asumsi PAD konstan.

Besarnya  $R^2 = 0,974$  artinya APBD di Kabupten Purworejo 97,4% dibiayai dari PAD dan DAU, selebihnya 2,6% berasal dari pendapatan lain-lain diluar PAD dan DAU.

Kabupaten Purworejo pendapatan asli daerah (PAD) sangat dominan peranannya dalam menopang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

#### 4. Kabupaten Kebumen

Untuk mengetahui besarnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) Kabupaten Kebumen untuk tahun 2001 – 2011 dapat dilihat dari perhitungan berikut ;

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-7.399E7	5.215E7		-1.419	.194
	PAD	-.129	1.058	-.011	-.122	.906
	DAU	1.562	.147	.991	10.653	.000
a. Dependent Variable: APBD Kb						

Dari hasil perhitungan dengan bantuan SPSS diperoleh persamaan regresi Kabupaten Kebumen sebagai berikut ;  $Y = -7,399 - 0,129 X_1 + 1,562 X_2$ . Kemudian didukung oleh  $F_{hitung} = 115,168 \geq F_{tabel} 4,46$  yang berarti bahwa secara bersama-sama PAD dan DAU di Kabupaten Kebumen berpengaruh secara bermakna terhadap APBD. Dari persamaan regresi diatas dapat disimpulkan bahwa ;

$a = -7,399$  artinya tanpa ditopang oleh PAD dan DAU maka APBD Kabupaten Kebumen harus didukung oleh surplus APBD tahun sebelumnya atau berasal dari pinjaman sebesar Rp.7,399 milyar.

$b_1 = -0,129$  artinya dengan meningkatnya PAD sebesar 1 Rp. 1 milyar maka APBD Kabupaten Kebumen berkurang dengan Rp. 0,129 milyar, dengan asumsi DAU konstan.

$b_2 = 1,562$  artinya dengan meningkatnya DAU sebesar Rp. 1 milyar maka APBD Kabupaten Kebumen akan menngkat sebesar Rp. 1,562 milyar dengan asumsi PAD konstan.

Besarnya  $R^2 = 0,966$  artinya 96,6% APBD Kabupaten Kebumen ditopang oleh PAD dan DAU, selebihnya 3,4% berasal dari pendapatan lain-lain diluar PAD dan DAU.

Dengan perhitungan tersebut diatas maka dana alokasi umum (DAU) Kabupaten Kebumen sangat dominan dalam menopang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

## 5. Kabupaten Temanggung

Untuk mengetahui besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabuptaen Temanggung dapa tdilihat dari perhitungan sebagai berikut ;

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	407702.337	3.050E7		.013	.990
	PAD	4.621	1.557	.421	2.967	.018
	DAU	.944	.230	.582	4.103	.003
a. Dependent Variable: APBD Tmg						

Dari hasil perhitungan dengan bantuan SPSS diperoleh persamaan regresi untuk Kabupaten Temanggung sebagai berikut ;  $Y = 407702,337 + 621 X_1 + 0,944 X_2$ . Dengan didukung oleh besarnya  $F_{hitung} = 415,101 \geq F_{tabel} = 4,46$  maka dapat dikatakan bahwa secara bersama-sama PAD dan DAU memiliki pengaruh secara bermakna terhadap APBD. Dari persamaan regresi diatas dapat disimpulkan bahwa ;

$a = 407702,337$  artinya tanpa adanya PAD dan DAU maka APBD Kabupaten Temanggung akan menjadi sebesar Rp.407.702,337 milyar. Ini berarti bahwa disamping PAD dan DAU di Kabupaten Temanggung terdapat sumber lain diluar kedua variable tersebut.

$b_1 = 4,621$  artinya apabila pada tahun 2014 mendatang PAD di Kabupaten Temanggung meningkat sebesar Rp. 1 milyar maka APBD akan meningkat sebesar Rp.4,621 milyar dengan asumsi DAU tetap.

$b_2 = 0,944$  artinya apabila pada tahun 2014 mendatang DAU meningkat sebesar Rp. 1 milyar maka APBD akan meningkat sebesar Rp. 0,944 milyar dengan asumsi PAD tetap.

Besarnya  $R^2 = 0,990$  artinya 99% APBD Kabupaten Temanggung ditopang oleh PAD dan DAU, sedangkan 1% berasal

dari pendapatan lain-lain diluar PAD dan DAU.

Dengan demikian maka pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Temanggung sangat dominan dalam membiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

## 6. Kabupaten Wonosobo

Besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 – 2011 dapat dilihat dari perhitungan sebagai berikut ;

oefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3.269E7	2.788E7		-1.172	.275
	PAD	7.114	1.165	.525	6.106	.000
	DAU	.904	.155	.503	5.851	.000
Dependent Variable: APBD Wns						

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS maka diperoleh persamaan regresi untuk Kabupaten Wonosobo sebagai berikut ;  $Y = -3,269 + 7,114 X_1 + 0,904 X_2$  dan didukung oleh  $F_{hitung} = 265,956 \geq F_{tabel} = 4,46$ . Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama PAD dan DAU berpengaruh secara bermakna terhadap APBD. Dari persamaan regresi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut ;

$a = -3,269$  artinya tanpa ditopang oleh PAD dan DAU maka APBD Kabupaten Wonosobo pada tahun tertentu akan negative, yang

berarti harus menggunakan surplus anggaran tahun yang lalu atau mencari pinjaman.

$b_1 = 7,114$  artinya apabila pada tahun 2014 mendatang PAD meningkat sebesar Rp. 1 milyar maka APBD akan meningkat sebesar Rp. 7,114 milyar dengan asumsi DAU tetap.

$b_2 = 0,904$  artinya apabila pada tahun 2014 mendatang DAU meningkat, sebesar Rp. 1 milyar maka APBD akan meningkat sebesar Rp. 0,904 milyar dengan asumsi PAD tetap.

Besarnya  $R^2 = 0,985$  artinya APBD Kabupaten Wonosobo 98,5% dibiayai oleh PAD dan DAU sedangkan sisanya 1,5% berasal dari pendapatan lain-lain diluar PAD dan DAU.

Dengan demikian Kabupaten Wonosobo, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dominan peranannya dalam menopang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

## **E. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

### **1. Kesimpulan**

Dari perhitungan dan analisa pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Dari 6 (enam) Daerah Tingkat II se Eks Karesidenan Kedu, ada 4 (empat) daerah yaitu Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang sangat ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD)nya masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari besarnya koefisien regresi dan peran PAD secara berurutan sebagai berikut :

$b_1$  untuk Kabupaten Wonosobo sebesar 7,114.

$b_1$  untuk Kota Magelang sebesar 6,697.

b<sub>1</sub> untuk Kabupaten Temanggung sebesar 4,621.

b<sub>1</sub> untuk Kabupaten Purworejo sebesar 4,532.

Sedangkan untuk Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kebumen peran PAD terhadap APBD adalah negatif.

Peranan dominan dana alokasi umum (DAU) terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), terdapat di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kebumen, kemudian diikuti oleh Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Hal ini dapat dilihat dari besarnya koefisien sebagai berikut ;

b<sub>2</sub> untuk Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kebumen sebesar 1,562.

b<sub>2</sub> untuk Kabupaten Purworejo sebesar 1,012.

b<sub>2</sub> untuk Kabupaten Temanggung sebesar 0,944..

b<sub>2</sub> untuk Kabupaten Wonosobo sebesar 0,904.

Dengan perhitungan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dienam Daerah Tingkat II Kabupaten / Kota se Eks Karesidenan Kedu, peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rata-rata lebih dominan dibandingkan dengan Dana Alokasi Umum (DAU).

Berdasarkan R Square untuk masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota se Eks Karesidenan sebagai berikut ;

Kota Magelang	= 0,824
Kabupaten Magelang	= 0,966
Kabupaten Purworejo	= 0,974
Kabupaten Kebumen	= 0,966
Kabupaten Temanggung	= 0,990
Kabupaten Wonosobo	= 0,985

Dari angka-angka tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata untuk masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota se Eks Karesidenan Kedu, memiliki APBD yang dibiayai oleh 96% lebih dari PAD dan DAU, sedangkan selebihnya kurang dari 3,5% berasal dari pendapatan lain-lain. Kecuali APBD Kota Magelang 82,4% dibiayai oleh PAD dan DAU, sedangkan sisanya 17,6% berasal dari pendapatan lain-lain.

## **2. Implikasi**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka kami dari tim peneliti mengemukakan saran sebagai berikut :

Karena peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disemua Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota se Eks Karesidenan Kedu sangat besar, maka perlu digali sumber-sumber daerah yang potensial untuk dapat meningkatkan PAD tersebut, sehingga dengan demikian dapat meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD.

Demikian juga halnya dengan Dana Alokasi Umum (DAU), walaupun dimasing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota se Eks Karesidenan Kedu peranannya berada dibawah PAD, tetapi perlu perhatian oleh Pemerintah pusat, agar pada tahun-tahun mendatang DAU Kabupaten / Kota dapat ditingkatkan, dengan harapan agar APBD juga meningkat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Haklim, 2002, *Ekonomi Pembangunan*, Penerbit EKONSIA, Yogyakarta.

Agustinus Suryantoro & Nugroho SBM, 2000, *Media Ekonomi dan Bisnis*, Vol.XII, No.2, FE UNDIP.

Aliminsyah, 2003, *Kamus Istilah Keuangan Dan Perbankan*, Yrama Widya, Bandung.

Anonim, 2000, *Statistik Indonesia, Statistical Year Book of Indonesia 2000*, BPS, Jakarta.

....., 2002, *Indikator Ekonomi Indonesia*, BPS, Jakarta

....., 2006, *Statistik Indonesia, Statistical Year Book of Indonesia 2005/2006*, BPS, Jakarta

....., 2007, *Statistik Indonesia, Statistical Year Book of Indonesia 2007*, BPS, Jakarta

Atmaja, Adwin S, *Inflasi di Indonesia: Sumber - Sumber Penyebab dan Pengendaliannya*, <http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/>, di download 28 april 2011

Boediono, 1999, *Ekonomi Makro*, BPFE, Jogjakarta.

Cooper and Emoy (1998), *Metode Penelitian Bisnis Jilid 2*, Penerjemah Widyo Sutjipto dan Uka Wikarya, Erlangga Jakarta.

Dumairy, 1996, *Perekonomian Indonesia*, Erkangga, Jakarta.



- Endy Dwi Tjahjono dan Ny. Hendy Sulistiowati, 1998, *Kebijakan Pengendalian Aliran Modal Masuk Di Indonesia*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Jakarta.
- Gerolamo Donald, *Inflasi dan Dampaknya Terhadap Investasi* [http://econc10.bu.edu/Ec.341\\_money/papers/Gerolamo\\_paper.htm](http://econc10.bu.edu/Ec.341_money/papers/Gerolamo_paper.htm), di download 10 Agustus 2011
- Gunawan, Anton Herman, 1991, *Anggaran Pemerintah dan Inflasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Hasan, Iqbal, 2004, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Hasan, Iqbal, 2003, *Pokok Pokok Materi Statistik 2 ,statistik inferensif*, PT Bumi aksara, Jakarta.
- I.Made Gitra Aryawan, (2009), *Pengaruh JUB dan PDB Terhadap Laju Inflasi di Indonesia Tahun 2000-2007*, Majalah Ilmiah UNTAB Vol.6 No.1, Tabanan.
- Kuncoro, Mudrajad, 2000, *Ekonomi Pembangunan*, AMP YKPN, Yogyakarta
- Mankiw, N Gregory, 2003, *Teori Makro Ekonomi*, Edisi Keempat, Alih Bahasa Imam Nurmawan, Erlangga, Jakarta
- Mantra, Ida Bagoes, 2004, *Demografi Umum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

- MC. Maryati, 2001, *Statistik Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Nopirin, 2001, *Ekonomi Internasional*, Edisi ketiga, BPFE , Yogyakarta
- Paul A.Samuelson, William D Nordhaus, 2003, *Makro Ekonomi, Edisi ke-14*, Erlangga, Jakarta
- PS, Djarwanto, 2001, *Statistik Sosial Ekonomi*, Bagian pertama, Edisi ketiga, BPFE, Jogjakarta
- Salvatore, Dominick, 1997, *Ekonomi Internasional*, Erlangga Jakarta
- Sarwedi, 2002, *Investasi Asing Langsung Di Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, <http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/>, di download 12 Agustus 2011
- Sudjana, 2002, *Metoda Statistika untuk Ekonomi dan Bisnis*, Tarsito, Bandung
- Sukirno, Sadono, 2006, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, FEUI Bima Grafika, Jakarta.